

## *Manajemen Peserta Didik Dalam Perkembangan Karakter Inklusif*

**Imron Khawaiji, Adi Wibowo, Daimah**

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo, Indonesia

Email: [Imronkhawaiji@gmail.com](mailto:Imronkhawaiji@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to comprehensively describe the management of the character education strengthening program at the elementary school level. The method used is a case study with a qualitative approach, located at SD Mutiara Ibu Purworejo. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. Data analysis went through three stages: data condensation, data presentation, and conclusion drawing. The results showed several important findings. First, the planning of student management in inclusive character development includes initial observation, coordination meetings, program planning, implementation, monitoring, and evaluation. Second, the principal acts as the main person in charge with the support of the school development team and program coordinators. Third, program implementation is carried out through four main strategies: integration into learning, value cultivation, role modeling, and collaboration with parents. Fourth, program supervision is carried out directly and continuously. Fifth, program evaluation includes evaluation planning, implementation, data processing, and follow-up meetings for program improvement. Thus, the management of the character strengthening program at SD Mutiara Ibu Purworejo runs systematically and involves all school components as well as parents.*

**Keywords:** *Student Management, Inclusive Character Development, Elementary School.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan manajemen program penguatan pendidikan karakter di tingkat sekolah dasar secara komprehensif. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif, berlokasi di SD Mutiara Ibu Purworejo. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui tiga tahap: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, perencanaan manajemen peserta didik dalam pengembangan karakter inklusif meliputi observasi awal, rapat koordinasi, penyusunan program kerja, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi. Kedua, kepala sekolah berperan sebagai penanggung jawab utama dengan dukungan tim pengembang sekolah dan koordinator program. Ketiga, implementasi program dilakukan melalui empat strategi utama, yaitu pengintegrasian dalam pembelajaran, pembudayaan nilai, keteladanan, serta kolaborasi dengan orang tua. Keempat, pengawasan program dilaksanakan secara langsung dan berkelanjutan. Kelima, evaluasi program mencakup perencanaan evaluasi, pelaksanaan, pengolahan data, dan rapat tindak lanjut perbaikan program. Dengan demikian, manajemen program penguatan karakter di SD Mutiara Ibu Purworejo berjalan secara sistematis dan melibatkan seluruh komponen sekolah serta orang tua.

**Kata Kunci:** *Manajemen Peserta Didik, Pengembangan Karakter Inklusif, Sekolah Dasar.*

## A. Pendahuluan

Pendidikan berperan penting dalam mempersiapkan peserta didik menghadapi peran mereka di masa depan, sekaligus menjadi faktor strategis dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia dan mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Pelaksanaan pendidikan harus sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3, yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat demi mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan tersebut mencakup pengembangan potensi peserta didik agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berpengetahuan luas, terampil, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pendidikan memiliki fungsi utama untuk membentuk watak, yang dalam hal ini diartikan sebagai karakter inklusif. Pendidikan karakter berperan penting dalam membangun moral peserta didik. Menurut Lickona, karakter inklusif mencakup tiga aspek, yaitu konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral.<sup>2</sup>

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kelanjutan sekaligus revitalisasi gerakan nasional pendidikan karakter yang telah dimulai sejak tahun 2010. Saat ini, penerapan PPK atau pendidikan moral menjadi penting untuk mengatasi krisis moral yang tengah dihadapi bangsa, seperti meningkatnya pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, pornografi, kekerasan terhadap anak dan remaja, pencurian, kebiasaan menyontek, hingga tawuran yang masih menjadi masalah sosial.<sup>3</sup> Selain ancaman terhadap keutuhan dan masa depan bangsa, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan global, seperti rendahnya indeks pembangunan manusia yang mengurangi daya saing bangsa, lemahnya kondisi fisik anak akibat minimnya aktivitas olahraga, serta rendahnya apresiasi seni, estetika, dan pemahaman etika selama masa pendidikan. Kondisi ini menjadi alasan kuat untuk memperkuat jati diri dan identitas bangsa melalui Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Keberadaan PPK memiliki arti penting karena perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil pembentukan karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor lingkungan tersebut mencakup lingkungan fisik dan budaya sekolah, manajemen pendidikan, kurikulum, tenaga pendidik, serta metode pembelajaran yang digunakan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3.

<sup>2</sup> Isnaini, *Pendidikan Karakter Inklusif*, 2016, hlm. 36.

<sup>3</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*, 2017, hlm. 2-5.

<sup>4</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*, 2017, hlm. 8-12.

Pembentukan karakter inklusif melalui faktor lingkungan dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi, seperti memberikan keteladanan, melakukan intervensi, membiasakan perilaku positif secara konsisten, dan memberikan penguatan. Artinya, proses pengembangan karakter memerlukan contoh yang baik, intervensi melalui pembelajaran, pelatihan, pembiasaan berkelanjutan dalam jangka panjang, serta penguatan yang didukung nilai-nilai luhur.<sup>5</sup> Prinsip ini sejalan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pasal 5, yang menekankan: (a) pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dan terpadu, (b) keteladanan dalam penerapan pendidikan karakter di setiap lingkungan pendidikan, dan (c) pembiasaan yang berlangsung terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari.<sup>6</sup>

Setiap instansi pendidikan memiliki pola pembentukan karakter inklusif yang berbeda, disesuaikan dengan peraturan dan kondisi masing-masing, termasuk sistem pembinaan, pengasuh, dan karakteristik peserta didik. Salah satu contoh penerapan program Penguatan Pendidikan Karakter adalah di SD Mutiara Ibu Purworejo yang melaksanakan empat kegiatan utama secara berkesinambungan, yaitu pengintegrasian, pembudayaan, keteladanan, dan kerja sama dengan orang tua.<sup>7</sup> Sasaran utama program ini adalah peserta didik, dengan guru dan staf sekolah berperan sebagai teladan. Mereka menjadi contoh nyata bagi siswa dalam memperkuat pembentukan karakter.

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris *management*, yang bersumber dari kata *to manage* berarti mengelola. Menurut Sahertian, manajemen mencakup dua jenis kegiatan, yakni pemikiran dan tindakan.<sup>8</sup> Hidayatullah mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengisian staf, kepemimpinan, dan pengendalian guna mengoptimalkan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pada intinya, manajemen adalah proses kerja sama dengan individu maupun organisasi lain untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>9</sup>

Manajemen pada hakikatnya memiliki tingkatan tertentu, baik dari segi struktur, kewenangan, maupun fungsi yang dijalankan. Salah satu fungsi utamanya adalah perencanaan, yang berhubungan dengan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan di masa depan.<sup>10</sup> Perencanaan merupakan proses rasional dan sistematis dalam menentukan keputusan, aktivitas, atau langkah yang akan dilakukan guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

---

<sup>5</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*, 2017, hlm. 8-12.

<sup>6</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, Pasal 5.

<sup>7</sup> Hasil observasi awal di SD Mutiara Ibu Purworejo, 2023.

<sup>8</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 372; Piet A. Sahertian dalam Imron, *Manajemen Pendidikan*, Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2012, hlm. 5.

<sup>9</sup> Hidayatullah, *Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 9-10.

<sup>10</sup> Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004, hlm. 45

Tahap ini mencakup pemetaan yang tepat untuk merumuskan rencana yang, setelah ditetapkan, dapat diimplementasikan demi mencapai tujuan organisasi.<sup>11</sup>

Fungsi berikutnya adalah pengorganisasian, yang berarti menyusun struktur organisasi sesuai tujuan, sumber daya, dan kondisi lingkungannya. Menurut Terry, pengorganisasian mencakup upaya mengatur hubungan perilaku yang efektif antarindividu untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan.<sup>12</sup> Selanjutnya, fungsi penggerakan merupakan tahap pelaksanaan dari perencanaan dan pengorganisasian.<sup>13</sup> Fungsi ini menekankan pembentukan kerja sama antaranggota organisasi dan peningkatan motivasi kerja untuk mewujudkan tujuan. Pengarahan dan bimbingan sebagai bagian dari fungsi pelaksanaan memerlukan komunikasi yang efektif dan efisien.<sup>16</sup> Fungsi-fungsi dalam manajemen saling terhubung dan membentuk satu rangkaian yang tidak terpisahkan dalam proses pengelolaan organisasi.

Fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan manajemen. Pengawasan bertujuan mengukur dan menilai efektivitas kinerja organisasi serta efisiensi penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan. Dalam evaluasi termasuk evaluasi pembelajaran diperlukan informasi yang akurat melalui kegiatan pengukuran. Evaluasi sendiri merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai kualitas suatu hal berdasarkan kriteria tertentu, guna mendukung pengambilan keputusan.<sup>14</sup>

Pendidikan pada dasarnya tidak hanya berfokus pada pemberian pengetahuan, tetapi juga harus mengasah kemampuan intelektual sekaligus membentuk generasi berkarakter. Istilah karakter berasal dari bahasa Yunani *charassein* yang berarti "mengukir," menggambarkan proses pembentukan karakter layaknya mengukir batu permata atau logam keras.<sup>15</sup> Menurut Bohlin dkk, karakter diartikan sebagai tanda khas atau pola perilaku, sedangkan KBBI mendefinisikannya sebagai sifat batin, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan individu satu dengan lainnya. Dengan demikian, karakter merupakan sifat yang mantap, stabil, dan melekat dalam diri seseorang.<sup>16</sup>

Dari konsep ini lahir istilah pendidikan karakter, yang menurut Megawangi adalah upaya mendidik anak agar mampu mengambil keputusan dengan bijak dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk memberi dampak positif bagi lingkungannya. Pembangunan karakter menjadi tanggung jawab setiap individu dan merupakan salah satu tujuan utama sistem

---

<sup>11</sup> Mulyono, *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010, hlm. 37-38.

<sup>12</sup> George R. Terry, *Principles of Management*, Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1960, hlm. 52

<sup>13</sup> Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 47.

<sup>14</sup> Wiyono dan Sunarni, *Evaluasi Pembelajaran*, Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2009, hlm. 23

<sup>15</sup> Doni Koesoema A., *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2010, hlm. 3-4.

<sup>16</sup> Karen Bohlin dkk dalam Sri Judiani, "Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar", *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16, No. 2, 2010, hlm. 119-120

pendidikan di Indonesia, yang mengarahkan peserta didik pada pengenalan, penghayatan, dan penerapan nilai-nilai luhur.<sup>17</sup> Pendidikan karakter dilaksanakan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi dasar nilai karakter bangsa. Oleh karenanya, pendidikan karakter pada dasarnya merupakan pengembangan nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa, agama, budaya, dan nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mencanangkan Program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di sekolah.<sup>18</sup> Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017, Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan yang berada di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk membentuk karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga, dengan melibatkan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).<sup>19</sup> Agar Program PPK dapat berjalan optimal di sekolah, diperlukan sinergi antara kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikannya di kegiatan pembelajaran. Kepala sekolah berperan mendesain budaya sekolah sebagai identitas dan keunggulan sekolah, sementara guru bertugas mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses belajar di kelas serta mengelola manajemen kelas agar program ini dapat terwujud.<sup>20</sup>

Gerakan PPK memprioritaskan pengembangan lima nilai utama yang saling terhubung dalam membentuk jejaring nilai karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas.<sup>26</sup> Religius, mencerminkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan subnilai seperti cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, serta menolak perundungan dan kekerasan. Nasionalis, mencerminkan kepedulian dan penghargaan terhadap bahasa, lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, dengan subnilai antara lain rela berkorban, berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin, dan menghormati keberagaman budaya, suku, dan agama. Mandiri, menunjukkan sikap tidak bergantung pada orang lain, dengan subnilai seperti etos kerja, profesionalisme, dan kreativitas. Gotong Royong, mencerminkan semangat kerja sama untuk menyelesaikan masalah bersama dan membantu sesama, dengan subnilai seperti menghargai, kerja sama, komitmen, musyawarah, tolong-menolong, dan solidaritas. Integritas, mencerminkan perilaku yang dapat dipercaya, dengan subnilai seperti kejujuran, antikorupsi, keadilan, dan tanggung jawab.<sup>26</sup>

---

<sup>17</sup> Ratna Megawangi dalam Dharma Kesuma dkk, *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012, hlm. 15-16.

<sup>18</sup> Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*, 2017, hlm. 1.

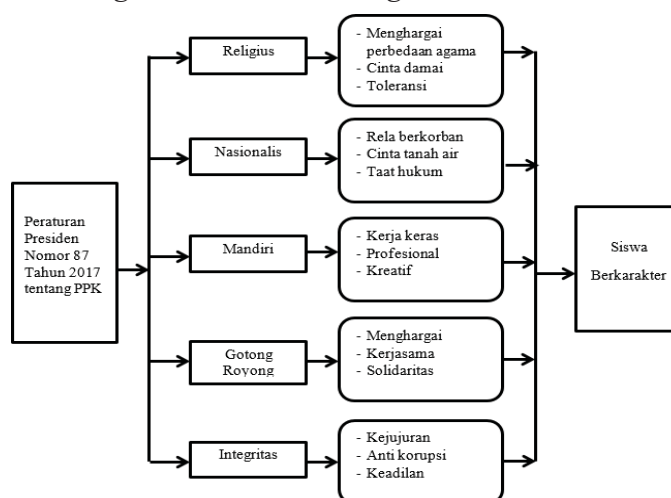
<sup>19</sup> Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017, Pasal 1.

<sup>20</sup> Rumah Juara, *Panduan Praktis Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah*, Jakarta: Rumah Juara, 2017, hlm. 7-8.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk menggali informasi secara mendalam terkait manajemen program penguatan pendidikan karakter di SD Mutiara Ibu Purworejo, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama.<sup>21</sup> Sumber data primer diperoleh dari Kepala SD Mutiara Ibu Purworejo selaku informan utama, sedangkan sumber data sekunder berasal dari koordinator kurikulum, koordinator mutu, dan wali murid. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program penguatan pendidikan karakter di sekolah tersebut.

**Gambar 1** *Bagan Nilai Utama Penguatan Pendidikan Karakter*



Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada teori Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>22</sup> Proses analisis ini dilakukan secara sistematis untuk menelusuri dan mengorganisasikan transkrip wawancara, catatan lapangan, dan berbagai materi lainnya guna menemukan hal-hal penting yang dapat dilaporkan sebagai temuan penelitian.

## C. Pembahasan

### 1 Perencanaan Program Penguatan Pendidikan Karakter Inklusif

Perencanaan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) inklusif di SD Mutiara Ibu Purworejo dilaksanakan melalui tahapan yang sistematis, meliputi observasi, rapat koordinasi, penyusunan program kerja, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Seluruh tahapan ini didasarkan pada penguatan karakter inklusif yang menghargai keberagaman, menjunjung kesetaraan, serta menolak segala bentuk diskriminasi. Observasi awal dilakukan untuk memetakan kondisi lingkungan sekolah dan karakter peserta didik yang

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 9.

<sup>22</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi Ketiga, Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014, hlm. 31-33.

heterogen, baik dari latar belakang sosial, budaya, maupun kemampuan akademik. Hasil observasi ini menjadi fondasi dalam merumuskan program yang responsif terhadap kebutuhan seluruh peserta didik tanpa kecuali.

Teori perencanaan menurut Sudjana menegaskan bahwa perencanaan berhubungan dengan serangkaian kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan di masa depan.<sup>23</sup> Sementara itu, Mulyono menjelaskan bahwa perencanaan merupakan proses rasional dan sistematis dalam menetapkan keputusan dan langkah-langkah guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>24</sup> Dalam konteks pendidikan karakter inklusif, proses perencanaan di SD Mutiara Ibu Purworejo telah mengacu pada prinsip tersebut, terutama dengan melibatkan berbagai pihak seperti pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pengawas dari Dinas Pendidikan. Keterlibatan multistakeholder ini menjadi faktor kunci dalam menanamkan nilai-nilai inklusivitas secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, Sagala menegaskan bahwa perencanaan sekolah yang efektif harus menghasilkan program yang fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan mencakup berbagai aspek seperti pembelajaran, pengembangan kurikulum, kegiatan siswa, hingga hubungan sekolah dengan masyarakat.<sup>25</sup> Di SD Mutiara Ibu Purworejo, fleksibilitas tersebut diwujudkan melalui penyusunan program kerja yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter inklusif ke dalam kegiatan pembelajaran, budaya sekolah, dan aktivitas pendukung lainnya. Dengan demikian, perencanaan yang matang dan partisipatif menjadi landasan kuat bagi tercapainya tujuan pembentukan karakter inklusif peserta didik secara optimal.

## 2 Pengorganisasian Program Penguatan Pendidikan Karakter Inklusif

Pengorganisasian program PPK inklusif di SD Mutiara Ibu Purworejo dirancang untuk menciptakan hubungan kerja yang efektif antar seluruh warga sekolah. Kepala sekolah bertindak sebagai penanggung jawab utama, dibantu oleh tim pengembang sekolah dan para koordinator bidang seperti kesiswaan, sarana prasarana, serta hubungan masyarakat. Struktur ini memastikan bahwa setiap kebijakan dan kegiatan sekolah berorientasi pada penguatan karakter inklusif, termasuk penciptaan lingkungan yang ramah, aman, dan tidak diskriminatif. Tim pengembang sekolah, yang terdiri dari koordinator kurikulum dan pengembang mutu, berperan dalam mengintegrasikan prinsip inklusivitas ke dalam pembelajaran dan budaya sekolah.

---

<sup>23</sup> Sudjana, *Manajemen Program Pendidikan* (Bandung: Falah Production, 2004), hlm. 45.

<sup>24</sup> Mulyono, *Perencanaan Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 23.

<sup>25</sup> Sagala, *Administrasi Pendidikan Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 67.

Menurut Terry dalam Hasibuan, pengorganisasian merupakan upaya membangun hubungan kerja yang efektif antar individu sehingga tercipta kerja sama yang efisien dan memberikan kepuasan dalam menjalankan tugas demi tercapainya tujuan.<sup>26</sup> Dalam konteks pendidikan karakter, pengorganisasian di SD Mutiara Ibu Purworejo diarahkan untuk menumbuhkan interaksi kerja yang mencerminkan sikap saling menghargai, keterbukaan, empati, dan penerimaan terhadap perbedaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI bahwa organisasi dipandang sebagai sistem interaksi antar individu untuk mencapai tujuan bersama, di mana sistem tersebut mengarahkan perilaku anggota organisasi.<sup>27</sup>

Terdapat tiga unsur pokok dalam pengorganisasian menurut Barnard, yaitu kerja sama, pencapaian tujuan, dan komunikasi.<sup>28</sup> Ketiga unsur ini di SD Mutiara Ibu Purworejo dilandasi oleh nilai-nilai karakter inklusif. Kerja sama diwujudkan melalui rapat koordinasi rutin, pencapaian tujuan difokuskan pada pembentukan sikap toleransi dan empati, sedangkan komunikasi terbuka dijalin antara kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Dengan demikian, pengorganisasian yang inklusif telah sesuai dengan teori dan menjadi faktor pendorong keberhasilan program secara menyeluruh.

### 3 Pengawasan Program Penguatan Pendidikan Karakter Inklusif

Pengawasan program PPK inklusif di SD Mutiara Ibu Purworejo dilakukan secara langsung oleh kepala sekolah dengan metode observasi dan supervisi akademik. Kepala sekolah memantau jalannya kegiatan serta kinerja guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter inklusif ke dalam pembelajaran di kelas. Aspek yang diawasi meliputi terciptanya suasana belajar yang adil, ramah, dan menghargai keberagaman peserta didik. Hasil pengawasan ini kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang. Selain itu, guru juga bertanggung jawab mengawasi peserta didik selama proses belajar, memastikan setiap anak memperoleh perlakuan setara dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif.

Murdick dalam Fattah menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses mendasar yang sangat diperlukan dalam suatu organisasi, di mana keberhasilan suatu rencana sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan. Dalam konteks pendidikan, Amtu mendefinisikan pengawasan sebagai proses mengukur dan menilai tingkat pengelolaan kerja personel serta efisiensi penggunaan sarana kerja untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi.<sup>29</sup> Di SD Mutiara Ibu Purworejo, pengawasan tidak hanya berorientasi

---

<sup>26</sup> Terry, dalam Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm. 89.

<sup>27</sup> Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, *Manajemen Pendidikan* (Bandung: UPI Press, 2012), hlm. 112.

<sup>28</sup> Barnard, dalam Septiani, *Teori Organisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 56.

<sup>29</sup> Murdick, dalam Fattah, *Konsep Manajemen Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 78.

pada ketercapaian program secara administratif, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai karakter inklusif dalam setiap aktivitas pembelajaran.

Kurniadin dan Machali menambahkan bahwa tujuan pengawasan meliputi pencegahan kesalahan, menciptakan suasana yang transparan, serta meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan dan inklusif.<sup>30</sup> Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kepala sekolah memberikan teguran yang bersifat edukatif dan konstruktif jika ditemukan hal yang kurang sesuai, sehingga program dapat berjalan lebih optimal. Dengan demikian, pengawasan di SD Mutiara Ibu Purworejo telah sejalan dengan teori dan berperan penting dalam menjaga konsistensi serta kualitas pelaksanaan pendidikan karakter inklusif.

#### **4 Evaluasi Program Penguatan Pendidikan Karakter Inklusif**

Evaluasi program PPK inklusif di SD Mutiara Ibu Purworejo dilaksanakan sebagai langkah lanjutan setelah pengawasan. Proses evaluasi mencakup empat tahapan utama: penyusunan rencana evaluasi dengan indikator nilai karakter inklusif (toleransi, empati, keadilan, penghargaan terhadap keberagaman), pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah, pengolahan dan analisis data, serta rapat koordinasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang ditemukan. Tujuan akhir dari evaluasi ini adalah agar pelaksanaan program ke depan semakin ramah, tidak diskriminatif, dan lebih optimal dalam membentuk karakter inklusif peserta didik.

Menurut Wiyono dan Sunarni, evaluasi dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat. Kurniadin dan Machali mendefinisikan evaluasi sebagai proses sistematis dan berkesinambungan untuk menentukan kualitas suatu hal berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu, yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.<sup>31</sup> Dalam konteks pendidikan karakter inklusif, kriteria evaluasi di SD Mutiara Ibu Purworejo tidak hanya berfokus pada ketercapaian program, tetapi juga pada keberhasilan internalisasi nilai-nilai inklusivitas dalam perilaku sehari-hari peserta didik di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Fattah menjelaskan bahwa tujuan evaluasi adalah menyediakan dasar pertimbangan, menjamin efektivitas dan efisiensi kerja, serta menemukan solusi atas hambatan yang dihadapi secara adil dan berkeadilan. Berdasarkan temuan penelitian, SD Mutiara Ibu Purworejo telah melaksanakan evaluasi sesuai dengan teori tersebut. Rapat evaluasi yang melibatkan kepala sekolah, tim pengembang, dan koordinator menjadi forum untuk merefleksikan capaian dan hambatan, sehingga perbaikan program dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan demikian, evaluasi berperan sebagai instrumen

---

<sup>30</sup> Kurniadin dan Machali, *Manajemen Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 201.

<sup>31</sup> Wiyono dan Sunarni, *Evaluasi Program Pendidikan* (Malang: UM Press, 2009), hlm. 54.

penting dalam memastikan penguatan pendidikan karakter inklusif berjalan efektif dan berkelanjutan.

#### D. Kesimpulan

Perencanaan program Penguatan Pendidikan Karakter di SD Mutiara Ibu Purworejo dilaksanakan melalui tahapan observasi, rapat koordinasi, penyusunan program kerja, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi dengan berlandaskan pada nilai inklusif (menghargai keberagaman, kesetaraan, anti-diskriminasi). Pengorganisasian melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, dibantu tim pengembang dan koordinator sekolah, untuk menciptakan kerja sama yang inklusif. Pelaksanaan mencakup integrasi, pembudayaan, keteladanan, dan kerja sama dengan orang tua secara berkelanjutan. Pengawasan langsung oleh kepala sekolah dan supervisi kinerja guru bertujuan memastikan suasana belajar yang adil dan ramah, sedangkan evaluasi dilakukan melalui empat tahap (penyusunan rencana, pengawasan, pengolahan data, rapat perbaikan) untuk menilai kualitas program serta memastikan terbentuknya karakter peserta didik yang kuat dan inklusif.

#### Referensi

- Amtu, Onisimus. *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Barnard, Chester. Dalam Septiani. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Bohlin, Karen, dkk. Dalam Sri Juidani. "Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar". *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 16, No. 2, 2010.
- Echols, John M., dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Fattah, Nanang. *Konsep Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Fattah, Nanang. *Evaluasi Kinerja Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Hidayatullah. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Imron, Ali. *Manajemen Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2012.
- Isnaini. *Pendidikan Karakter Inklusif*, 2016.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Kemdikbud, 2017.
- Kesuma, Dharma, dkk. *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Koesoema A., Doni. *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Kurniadin, Didin, dan Imam Machali. *Manajemen Pendidikan: Konsep & Prinsip Pengelolaan Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2014.
- Mulyono. *Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.
- Mulyono. *Perencanaan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Murdick, Robert G. Dalam Fattah. *Konsep Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Rumah Juara. *Panduan Praktis Penguatan Pendidikan Karakter di Sekolah*. Jakarta: Rumah

- Juara, 2017.
- Sagala, Syaiful. *Administrasi Pendidikan Kontemporer*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sahertian, Piet A. Dalam Imron. *Manajemen Pendidikan*. Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2012.
- Septiani. *Teori Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sudjana, Nana. *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2004.
- Sudjana. *Manajemen Program Pendidikan*. Bandung: Falah Production, 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Terry, George R. *Principles of Management*. Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1960.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). *Manajemen Pendidikan*. Bandung: UPI Press, 2012.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wiyono, dan Sunarni. *Evaluasi Pembelajaran*. Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2009.
- Wiyono, dan Sunarni. *Evaluasi Program Pendidikan*. Malang: UM Press, 2009.